

Optimalisasi Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Malang

Tri Joko Setyanto^{1, @}, Dwiyono Rudi Susanto², Jussac Maulana Masjhoer³

¹ Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

² Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

³ Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

ARTICLE INFO

Keywords:

Malang Regency;

Governance; Tourism

Village; Tourism Village

Category.

ABSTRACT

Tourism management in Malang Regency faces a number of challenges in improving the tourist village category. Despite having rich natural, cultural, and artificial potential, some tourist villages still experience low tourist visits, a lack of tourism facilities, and a lack of tourism human resource skills. This study aims to analyze the implementation of effective governance in improving the tourist village category in Malang Regency. Through a qualitative approach, this study considers aspects of policy, organizational structure, decision-making process, and supervision mechanism in tourism governance. The results show that to improve the tourist village category, measures such as human resource capacity development through training, tourism infrastructure improvement, tourism product innovation, and sustainable tourism development are needed. The importance of strengthening tourism regulations at the village level as well as the implementation of transparent, accountable, and sustainable governance is also emphasized.



This is an open access article under the CC BY-SA License.

1. Pendahuluan

Kabupaten Malang memiliki beragam potensi wisata alam, budaya, dan buatan. Pemerintah Kabupaten Malang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) untuk mengatur pembangunan pariwisata selama 15 tahun ke depan. Dokumen ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pariwisata dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Pada tahun 2023, Kabupaten Malang memiliki 83 desa wisata yang terbagi menjadi empat kategori: mandiri, maju, berkembang, dan rintisan, sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/253/KEP/35.07.013/2023.

@ trijoko.es@gmail.com

[Damiasih \(2023\)](#) menyebutkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, tata kelola telah menjadi isu utama secara global, terutama dalam industri pariwisata. Penerapan tata kelola perusahaan yang profesional menjadi krusial mengingat persaingan dan globalisasi yang semakin meningkat. Bisnis pariwisata tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian menyeluruh diperlukan untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk ketergantungan berlebihan pada sektor pariwisata, inflasi yang meningkat, harga tanah yang tinggi, dan peningkatan impor untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

[Teguh \(2020\)](#) menjelaskan bahwa kinerja tata kelola destinasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti peningkatan kunjungan, lama tinggal, kepuasan wisatawan, pengeluaran wisatawan, kualitas dan kuantitas daya tarik, pertumbuhan usaha pariwisata, penambahan fasilitas wisata, peningkatan *event* budaya, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM pariwisata. Keberhasilan tata kelola ini bergantung pada keterlibatan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan yang matang, dukungan sosial, infrastruktur yang memadai, serta daya dukung fisik dan kualitas pelayanan yang tinggi.

[Siregar \(2021\)](#) mengungkapkan bahwa di Indonesia, kesuksesan pariwisata sering diukur dengan jumlah devisa yang diperoleh, dengan penekanan pada jumlah kunjungan daripada kualitas pengalaman wisatawan, padahal peningkatan kualitas pengalaman wisatawan dapat meningkatkan jumlah kunjungan secara langsung. Kesalahan dalam memahami konsep kualitas dalam pariwisata yang hanya mempertimbangkan aspek penerimaan dapat merusak keseluruhan pengalaman wisatawan. [Mau \(2022\)](#) mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas produk dan layanan pariwisata akan meningkatkan kepuasan wisatawan dan daya saing sektor pariwisata. [Hubner, et.al \(2022\)](#) menyebutkan bahwa masyarakat di desa perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan pariwisata, dengan fokus pada peningkatan kualitas dari fasilitas dan pelayanan yang dimiliki. [Postma \(2002\)](#); [Utama \(2013\)](#); [Nurjaya, Solihin & Kanca \(2018\)](#) mengungkapkan bahwa indikator utama untuk mengukur kualitas pariwisata mencakup kualitas pengalaman, kualitas keuntungan, dan kualitas hidup penduduk setempat.

Setiap desa wisata menghadapi tantangan untuk meningkatkan statusnya, mulai dari tahap rintisan hingga mencapai status mandiri. Peningkatan status desa wisata memberikan manfaat seperti pengakuan yang lebih tinggi, akses ke pembiayaan dan bantuan infrastruktur, promosi yang lebih luas, dan peningkatan kunjungan wisatawan. Namun, desa wisata yang belum berkembang sering kesulitan karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, yang dapat menghambat pertumbuhan kunjungan wisatawan.

[Prakoso \(2022\)](#) mengungkapkan bahwa pengelolaan pariwisata di desa yang efektif tidak hanya menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga mengurangi isolasi sosial dan mendukung pembangunan pedesaan. Menurut riset [A'inun, Krisnani & Darwis \(2015\)](#) dijelaskan bahwa perkembangan desa wisata meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan kesempatan kerja baru dan memperbaiki infrastruktur. Selain itu, pengembangan desa sebagai destinasi pariwisata juga berperan dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas hidup warga, memberikan kontribusi ekonomi, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah, serta menjadi alat promosi yang efektif untuk produk lokal. ([Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021](#)).

Hasil observasi lapangan menunjukkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Malang, mencakup kurangnya kunjungan wisatawan, rendahnya pengeluaran, minimnya fasilitas pariwisata dan acara budaya, serta minimnya keterampilan SDM pariwisata. Selain itu, kurangnya inovasi dalam produk pariwisata juga mengurangi minat investor, sementara masyarakat setempat belum melihat peningkatan kualitas hidup

melalui sektor pariwisata. Prinsip keberlanjutan dalam melestarikan budaya dan lingkungan juga belum sepenuhnya diterapkan, dan upaya untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan masih kurang. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Malang, dengan harapan memperbarui tata kelola desa wisata agar lebih baik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melukiskan dan menggambarkan keadaan objek penelitian sesuai dengan situasi saat penelitian dilakukan (Ibrahim, 2018). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik yang serupa. Jaya (2023) #Jaya mengatakan bahwa Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata yang berasal dari data valid, memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan dan rekomendasi diambil dari hasil analisis, merangkum temuan penelitian dan implikasinya bagi berbagai pihak terkait.

A Populasi dan Sampel

Abdussamad (2021); Kasim, et.al (2020) dan Sujarweni (2023) menjelaskan bahwa populasi adalah subjek atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dalam wilayah topik penelitian, sementara sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan (). Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 83 desa wisata di Kabupaten Malang, dengan 9 desa wisata dipilih sebagai sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Desa-desanya yang dipilih mewakili mewakili 10% dari total populasi setiap kategori desa wisata (Mills & Gay, 2019). Desa-desanya yang dipilih antara lain: Pujon Kidul, Poncokusumo, Peniwen, Sumberdem, Kemantren, Sempalwadak, Kemantren, Ketindan, Toyomarto, dan Bangelan.

B Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Hikmawati (2020) menjelaskan bahwa data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya, sementara data sekunder berasal dari dokumen atau sumber lainnya. Dalam penelitian ini, informan memiliki peran krusial. Informan penelitian melibatkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, perwakilan pemerintah desa, pengelola, dan tokoh masyarakat. Di antara informan, pengelola desa wisata merupakan informan kunci yang berperan penting sebagai sumber informasi utama dan penghubung antara peneliti dengan informan lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa wisata mengutamakan pengalaman autentik, partisipasi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Pengembangannya berlangsung melalui empat tahap: rintisan, berkembang, maju, dan mandiri, disesuaikan dengan kemajuan infrastruktur dan pariwisata. Tantangan dalam pengelolaan tercermin dari hasil wawancara dengan 23 narasumber dari berbagai pihak terkait, termasuk instansi pariwisata, pemerintah desa, pengelola desa wisata, dan tokoh masyarakat.

1) Desa Wisata Pujon Kidul

BUMDesa Sumber Sejahtera aktif melibatkan warga dalam kegiatan pariwisata dan menjalin kemitraan dengan perusahaan serta lembaga pendidikan untuk memperluas program-programnya. Saat ini, BUMDesa ini memiliki sekitar 130 karyawan dan melibatkan 1.050 warga dalam kegiatannya. Hal ini telah meningkatkan ekonomi desa sebagai hasil dari pengembangan desa wisata. Kehadiran BUMDesa ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa. BUMDesa juga bermitra dengan beberapa perusahaan dan lembaga

pendidikan lainnya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, terutama karena latar belakang pendidikan, diatasi dengan merekrut dan melatih pegawai baru serta melakukan studi banding ke BUMDesa atau pokdarwis lainnya.

Untuk memperkuat sektor pariwisata, dikeluarkan serangkaian peraturan desa dan keputusan kepala desa yang mengatur berbagai aspek terkait pariwisata, diantaranya tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera dan perubahan fungsi lahan kas desa untuk kegiatan ekonomi desa, pariwisata, dan sarana pendukung lainnya. Program tahunan didesain untuk mendukung kegiatan wisata, dengan pemantauan dan pembinaan rutin untuk menjaga operasional optimal.

2) Desa Wisata Poncokusumo

Desa Wisata Poncokusumo dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo, dengan moto "Datang Sebagai Tamu, Pulang Sebagai Saudara." Selain pariwisata, Pokdarwis juga memajukan sektor UMKM, kuliner, dan seni budaya. Produk UMKM seperti kripik, sari buah, dan batik, serta makanan khas seperti Kolak Goblok, ditawarkan di desa ini. Berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan di desa ini, diantaranya kuda lumping, bantengan, pencak dor, dan pertunjukan musik tradisional.

Sosialisasi yang luas telah dilakukan kepada masyarakat setempat untuk menjelaskan manfaat dari pengembangan desa wisata. Dampak positifnya sudah terlihat melalui peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar desa. Desa wisata membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi baru seperti warung makan, *homestay*, dan kerajinan lokal.

3) Desa Wisata Peniwen

Pokdarwis Gesang Selaras bertanggung jawab atas pengelolaan destinasi pariwisata di Desa Wisata Peniwen dan berperan aktif dalam mempromosikan dan melestarikan keberagaman budaya serta keindahan alamnya. Meskipun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur sektor pariwisata, pemerintah desa tetap proaktif dalam memberikan dukungan yang kuat dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memajukan pariwisata di Desa Peniwen. Walaupun BUMDes telah didirikan sejak tahun 2022, kerja sama antara BUMDes dan Pokdarwis Gesang Selaras masih belum optimal. Namun, upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki kerjasama tersebut guna memastikan pengelolaan pariwisata di desa berjalan lebih efektif dan efisien.

4) Desa Wisata Sumberdem

Pemerintah Desa Sumberdem mengambil langkah strategis meluncurkan program kampung tematik untuk mendorong pertumbuhan pariwisata. Dengan fokus pada potensi lokal, program ini bertujuan meningkatkan daya tarik dan kualitas pengalaman wisata dengan konsep unik di setiap kampung. Kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku pariwisata, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan program ini sebagai model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

Dikelola oleh Pokdarwis Bumi Asri, kampung tematik ini diharapkan memberikan dampak positif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam menentukan tema kampung dianggap penting dalam meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tema yang diusung. Meskipun belum ada regulasi desa khusus untuk pariwisata, pemerintah desa terlibat aktif dalam pengawasan dan pembinaan setiap bulan.

5) Desa Wisata Sempalwadak

BUMDes Mustika dibentuk untuk meningkatkan pendapatan desa dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal, termasuk pengembangan UMKM dan potensi pariwisata. Namun, saat ini, kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait masih belum mencapai tingkat optimal.

6) Desa Wisata Kemantren

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efisiensi pengelolaan serta promosi pariwisata desa, Pokdarwis Mantra didirikan. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan sambil menjaga warisan seni dan budaya tradisional sebagai ciri khas Desa Kemantren. Pemerintah Desa Kemantren telah memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan sektor pariwisata dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung pengembangan seni dan budaya lokal.

7) Desa Wisata Ketindan

Desa Wisata Ketindan dikelola oleh BUMDes Ketindan Trad dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa secara rutin melakukan pengawasan dan pembinaan setiap semester. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan dukungan aktif dalam pengembangan desa wisata dengan meningkatkan fasilitas yang ada.

8) Desa Wisata Toyomarto

BUMDesa Arjuna didirikan untuk meningkatkan ekonomi dan memberdayakan penduduk desa serta menaikkan pendapatan sesuai dengan potensi lokal. Beberapa anggota Pokdarwis juga menjadi pengurus BUMDes untuk memastikan kerja sama yang baik antara keduanya. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara rutin setiap semester. Program-program yang didukung juga akan difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata dan infrastruktur desa. Selain itu, untuk memperkuat sektor pariwisata, peraturan desa dan keputusan kepala desa diterapkan, termasuk pembentukan BUMDes.

9) Desa Wisata Bangelan

Pokdarwis Desa Bangelan berperan dalam menggerakkan kegiatan pariwisata dan bermitra dengan perusahaan dan lembaga pendidikan untuk memperluas dampak program pariwisata. Wisata Bangelan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi. Meskipun belum ada peraturan desa yang mengatur pariwisata secara spesifik, pemerintah desa secara berkala melakukan pengawasan dan pembinaan setiap semester untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan aktivitas pariwisata.

10) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menempatkan pengembangan desa wisata sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan pariwisata. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Langkah-langkah konkret telah diambil, termasuk alokasi dana untuk kegiatan "Jelajah Desa Wisata Malang Makmur" dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Meskipun alokasi anggaran masih terbatas, upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan desa wisata di Kabupaten Malang.

Salah satu kendala dalam pengembangan desa wisata adalah kurangnya SDM berkualitas dan perencanaan yang kurang matang. Strategi untuk mengatasi hal ini melibatkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan desa wisata secara profesional. Ada

empat aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas desa wisata, yaitu *Product*, *Place*, *Price*, dan *Promotion*. *Product* (Produk) yang ditawarkan harus memiliki kualitas tinggi dan otentik, sedangkan *Place* (Tempat) harus memiliki daya tarik unik. *Price* (Harga) produk dan layanan harus disesuaikan dengan daya beli wisatawan, sementara *Promotion* (Promosi) harus dilakukan secara menarik, termasuk melalui media sosial dan kerja sama dengan *endorser* atau *influencer*.

Setelah melakukan analisis terhadap implementasi tata kelola desa wisata, berikut adalah rekomendasi untuk masing-masing kategori desa wisata:

1. Desa wisata mandiri: Peningkatan kapasitas SDM dan fokus pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Infrastruktur pariwisata juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.
2. Desa Wisata Maju: Pengembangan inovasi produk pariwisata, peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas SDM dan kesadaran masyarakat. Selain itu, penting juga untuk merumuskan regulasi pariwisata di tingkat desa.
3. Desa Wisata Berkembang: Peningkatan kapasitas SDM pariwisata, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan penyusunan regulasi pariwisata di tingkat desa. Promosi dan pemasaran melalui berbagai media juga perlu diperkuat.

Desa Wisata Rintisan: Pengembangan inovasi produk pariwisata, peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan, dan penyusunan regulasi pariwisata di tingkat desa. Penting juga meningkatkan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, dan promosi melalui berbagai media. Fokus pada pariwisata berkelanjutan dan infrastruktur pariwisata juga perlu diperhatikan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kategori desa wisata di Kabupaten Malang, perlu dilakukan tata kelola yang efektif. Langkah-langkahnya meliputi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur pariwisata untuk kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas wisatawan. Selain itu, diperlukan inovasi produk pariwisata dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Regulasi pariwisata di tingkat desa juga harus diperkuat, serta menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka :

Article :

- A'inun, F., Krisnani, H., & Darwis, R.S. (2015). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep *Community Based Tourism*. *Prosiding KS: Riset dan PKM*, 2(3), 301-444. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13581>
- Afrisal, A. F. (2022). *Collaborative Governance in Tourism Development Policy*. *Journal of Social Science*, 3(6), 1266–1270. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i6.478>
- Akoa, D., T., & Nnomo, M., P., (2024). *Tourism Governance In Cameroon and The Challenges of Modernity: An Overview*. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*. 2. 1-12. [10.61990/ijamesc.v2i1.114](https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i1.114).
- Baswarani, D. T. (2021). Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Pariwisata Berkualitas. *Warta Pariwisata*, 19(2), 12–13.

- <https://doi.org/10.5614/wpar.2021.19.2.04>
- Borseková, K., Vitálišová, K., & Bitušíková, A. (2023). *Participatory Governance and Models in Culture and Cultural Tourism*. Publishing house of Matej Bel University in Banská Bystrica. <https://doi.org/10.24040/2023.9788055720838>
- Budhi, I. A. (2017). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Chan, J. K. L. (2023). *Sustainable Rural Tourism Practices From the Local Tourism Stakeholders' Perspectives*. *Global Business and Finance Review*, 28(3), 136–149. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.3.136>
- Dumitru, I. M., & Cosma, S. A. (2023). *A Measurement of Rural Tourism Destinations' Competitiveness*. *Studia UBB Negotia*, 68(1), 81–97. <https://doi.org/10.24193/subbnegotia.2023.1.05>
- Gannon, M., Rasoolimanesh, S.M., & Taheri, B. (2020). *Assessing the Mediating Role of Residents' Perceptions toward Tourism Development*. *Journal of Travel Research*. doi:10.1177/0047287519890926, 2020
- Hasanah, B. (2019). Tata Kelola Desa Wisata Sukaratu Berbasis Kerakyatan. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 108–121. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1786>
- Huda, M. N. (2018). Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2).
- Junaid, I., & Salim, M. A. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i1.6>
- Kagermeier, A., Amzil, L., & Elfasskaoui, B. (2019). *The Transition of Governance Approaches to Rural Tourism in Southern Morocco*. *European Journal of Tourism Research*, 23, 40–62. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v23i.388>
- Latif, A. N. K. (2021). Mengenal Konsep Quality Tourism. *Warta Pariwisata*, 19(2), 5–6. <https://doi.org/10.5614/wpar.2021.19.2.02>
- Meyer, D. F., & Rheeders, T. (2023). *The Influence Of Good Governance On The Tourism Sector: The Case Of South Africa*. *Journal of Tourism, Leisure and Hospitality*. <https://doi.org/10.48119/toleho.1299375>
- Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.296>
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. *Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 211–220. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i4.1283>
- Nasution, T. (2021). Kebijakan Quality Tourism pada Product, Service, Management. *Warta Pariwisata*, 19(2), 1–4. <https://doi.org/10.5614/wpar.2021.19.2.01>
- Nurjaya, I.W., Solihin, S., & Kanca, I.N. (2018). Layanan Prima menuju "Quality Tourism" Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 53–66.
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(6), 98–107.
- Sulaj, A. (2023). *The Potential Of Rural Tourism On Securing The Heritage Of Albanian Villages*. *Proceedings of International Conference on Agriculture And Life Sciences#4*, 219-221. *Agricultural University of Tirana*.

- Umiyati, S., Wahyuni, S., & Ratnawati, S. (2023). *Collaborative Governance Model in Integrated Management of the Bromo Tengger Semeru Tourism Area through Local Wisdom Approach. Case Studies Journal*, 12(8), 1-7
- Utama, D. (2013). Strategi Menuju Pariwisata Bali yang Berkualitas (Strategy Towards Quality of Tourism Bali). *Jurnal Kajian Bali*, 69–89.
- Wibowo, B., Suherlan, H., Hidayah, N., & Nurrochman, M. (2022). Analisis Tata Kelola Kolaboratif Desa Wisata yang Mandiri dan Berkelanjutan: Investigasi Empiris dari Ngargoretno-Magelang. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 6(1), 75–84.
<https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.646>
- Wiyanti, S. (2021). Optimalisasi Destinasi Pariwisata dengan Pemberdayaan Potensi Alam Pesisir Pantai Utara sebagai Daya Tarik Kota Tegal: Analisis SWOT. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(2), 217–232.
[doi:https://doi.org/10.24905/permana.v13i2.197](https://doi.org/10.24905/permana.v13i2.197)
- Yuanditra, Y., & Mutia, E. A., (2021). Identifikasi Tata Kelola Desa Wisata Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v1i1.59>

Book :

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. BPS Kabupaten Malang.
- Damiasih. (2023). *Warnasari Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Desa Ketindan. (2023) *Profil Desa Ketindan 2023*. Malang: Desa Ketindan.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. (2022). *Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2022*. Malang: Renvapor.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. (2023). *Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2022*. Malang: Renvapor.
- Gautam, S. (2022). *Tourism Governance: Knowledge and Importance. Journal of Public Education*, 59-73. *National Campaign for Education Nepal*.
- Mills, G. E., & Gay, L. R. (2009). *Educational Research, Competencies for Analysis and Application Twelfth Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Gede, I. P. (2022). *Mengelola Desa Wisata*. Yogyakarta: K-Media.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Hubner, I., Rudy Pramono, Juliana, Nova Bernedeta Sitorus, Anugerah Agungputranto, Adolf Parhusip, & Desideria Lumongga Dwihiadih. (2022). *Pengembangan Produk Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkualitas di Kampung Keranggan Tangerang Selatan*. Ta'awun, 58-71.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ihalauw, J.J., Sugiharto, Damiasih, Hendratono, T., Christiansen, R., Herawan, T (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Jaya, I. M. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Kachniewska, M. (2006). *Tourism Quality Management*. Warszawa: Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.
- Kasim, A., Bungin, B., Dzakaria, H., Mokhtar, M.F., (2020). *Metode Penelitian Pariwisata dan Hospitaliti, Perspektif Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Kemendikbud/Baparekraf. (2020). Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (2021). Pedoman Desa Wisata. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Jakarta.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Buletin Studi Ekonomi, 19(1), 11.
- KSW Team. (2023). Tentang Desa Wisata Poncokusumo. <https://dewikusumo.com/about/>. Diakses tanggal 29 Maret 2024.
- Mau, Y.P. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Kembali Wisatawan dengan Kepuasan Pengunjung Sebagai Variabel Mediasi Ke Ecomangrove Kedonganan Badung_Bali. *Senorita*, 53-59.
- Muslih, M., Rahadi, D., & Marbun, S. (2019). Good Tourism Governance Terintegrasi: Suatu Pemikiran Kedepan. *Pariwisata*, 1–27.
- Postma, A. (2002). *An Approach for Integrated Development of Quality Tourism*. Dublin Institute of Technology: Sage.
- Prakoso, A. A. (2022). Konsep dan Teori Desa Wisata. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Sachaleli, Nino. (2023). *Sustainability as A Competitive Advantage in Rural Tourism Development. Agricultural Economics and Rural Development*. 2023. 41-52. 10.59277/AERD.2023.1.04.
- Septadiani, W.P., Pribadi, O.S.I., & Rosnarti, D. (2022). Peran Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Prosiding Seminar Intelektual Muda #8*, 22–31.
- Siregar, N. A. M. (2021). Kampung Kurcaci: Saat Kualitas Wisata Berbanding dengan Kualitas Lingkungan. *Warta Pariwisata*, 22-23.
- Slocum, S., & Curtis, K.R. (2017). *Food and Agricultural Tourism: Theory and Best Practice*. Abingdon: Routledge.
- Slocum, S., Aidoo, A., & McMahon, K. (2020). *The Business of Sustainable Tourism Development and Management*. Routledge: Oxon.
- Sujarweni, V. W. (2023). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Teguh, F. (2020). *Tata Kelola Destinasi Membangun Ekosistem Pariwisata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Vitálišová, K., Borseková, K., Vaňová, A. & Helie, T. (2021). *Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Policy of Cultural and Creative Industries of Slovakia. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration*, 29(1).

- World Tourism Organization (2017). *Practical Guidelines for Integrated Quality Management in Tourism Destinations - Concepts, Implementation and Tools for Destination Management Organizations*. Madrid.
- Zamzani, F., Faiz, I.A., & Mukhlis (2018). *Audit Internal: Konsep dan Praktik Sesuai International Standart for The Professional Practice of Internal Auditing*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Website :

- Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. (2020) Sejarah Desa. <http://pujonkidul-malangkab.desa.id/sejarah-des>. Diakses tanggal 26 Maret 2024.
- Desa Kemantren Kabupaten Malang. (2020). Sejarah Desa. <http://kemantren-malangkab.desa.id/sejarah-des>. Diakses tanggal 29 Maret 2024.
- Kantor Desa Peniwen. (2023). Potensi Desa Peniwen. <https://www.youtube.com/watch?v=OutNh5qWC6A>. Diakses tanggal 28 Maret 2024.
- Kecamatan Kromengan. (2021). Profil Desa Peniwen sebagai Desa Kristen dan Desa Wisata Budaya Yang Ada di Kecamatan Kromengan. <https://kromengan.malangkab.go.id/pd/page/detail?title=kromengan-peniwen-kromengan-peniwen-kromengan-peniwen-kromengan-peniwen-kromengan-peniwen-profil-des-peniwen-sebagai-des-kristen-dan-des-wisata-budaya-yang-ada-di-kecamatan-kromengan>. Diakses tanggal 28 Maret 2024.